BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang :

a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran terhadap keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Organisasi Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019-2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
5. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
7. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
8. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat yang diemban.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

10. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
11. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Perangkat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
   a. IKU Pemerintah Daerah; dan
   b. IKU Perangkat Daerah.

(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

(3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGGUNAAN IKU

Pasal 4

IKU digunakan Pemerintah Daerah untuk :

a. Perencanaan Jangka Menengah;
b. Perencanaan Tahunan;
c. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
d. Pelaporan Akuntabillitas Kinerja;
e. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah; dan
f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a

pada tanggal 6 Desember 2019

BUPATI ROTE NDAO

PAULINA HANING - BULLU

Diundangkan di Rote Ndao

pada tanggal 6 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019 NOMOR 0594

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : 84 TAHUN 2019
TANGGAL : 6 DESEMBER 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

VISI : **"Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan"**

MISI :
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	**Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia**	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	IPM = $^1/_3$ [$X_{(1)}$ + $X_{(2)}$ + $X_{(3)}$] Dimana: $X_{(1)}$: Indeks harapan hidup $X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $^2/_3$(indeks melek huruf) + $^1/_3$(indeks rata-rata lama sekolah) $X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak Indeks $X_{(i)}$= $X_{(i)}$ - $X_{(i)min}$ / [$X_{(i)max}$ - $X_{(i)min}$] Dimana: $X_{(i)}$: Indikator ke-i (i = 1, 2, 3) $X_{(i)max}$: Nilai maksimum sekolah $X_{(i)}$ $X_{(i)min}$: Nilai minimum sekolah $X_{(i)}$ Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM Indikator Komponen IPM (=X(I)) | Nilai maksimum | Nilai Minimum | Catatan Angka Harapan Hidup | 85 | 25 | Sesuai standar global (UNDP) Angka Melek Huruf | 100 | 0 | Sesuai standar global (UNDP) Rata-rata lama sekolah | 15 | 0 | Sesuai standar global (UNDP) Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996 | 732.720 | 300.000 | UNDP menggunakan PDB per kapita ril yang disesuaikan	Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, Dinas PKO Kab. Rote Ndao	BPS Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Dinas PKO Kab. Rote Ndao	Dinas PKO Kab. Rote Ndao

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	Angka Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao	Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao
		Prevalensi Stunting	%	$\frac{\text{Jumlah Balita Stunting}}{\text{Jumlah Balita diukur}} \times 100$		
	Meningkatnya Perlindungan dan pelayanan sosial dasar	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan	Seluruh Perangkat Daerah	Dinas Sosial dan BPS Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya Pengarus-utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	Komposit dari 3 (tiga) komponen : Pengambilan keputusan politik, Tingkat pendapatan dan Peranan dalam kehidupan sosial	Dinas P3AP2KB Kab. Rote Ndao	Dinas P3AP2KB
	Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Laju pertumbuhan Penduduk (%)	%	$r=\{(\frac{P_t}{P_0}) \times (\frac{1}{t}) - 1\} \times 100$ r = laju pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah penduduk pada tahun t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan P0 Pt= Po + (B - D) + (Mi - Mo) Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) B (*birth*) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t D (*death*) = Jumlah Kematian selama periode 0 - t Mo = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t Mi = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t	Dinas P3AP2KB Kab. Rote Ndao	Dinas P3AP2KB dan BPS Kab. Rote Ndao
2	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing**	Persentase Penduduk Miskin	%	Jumlah penduduk miskin / Jumlah seluruh penduduk x 100	Seluruh Perangkat Daerah	Dinas Sosial dan BPS Kab. Rote Ndao
		Pertumbuhan PDRB	%	$\frac{\text{PDRB (t+1)} - \text{PDRB (t)}}{\text{PDRB (t)}} \times 100$ Ket: t + 1 = tahun pengamatan PDRB t = Tahun pengamatan PDRB sebelumnya $[(1 + \Delta lnf_1)(1 + \Delta lnf_2)(1 + \Delta lnf_3)]^{1/t}] - 1$	Seluruh Perangkat Daerah	Bapelitbang dan BPS Kab. Rote Ndao

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Laju Inflasi	%	Dimana : ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi. Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut : $\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$ Dimana : Inf_n = nilai inflasi pada tahun n $Inf_{(n+1)}$ = nilai pada 1 tahun berikutnya n = tahun ...	Seluruh Perangkat Daerah	Bapelitbang dan BPS Kab. Rote Ndao
		PDRB Per Kapita ADHB	Rp	PDB per kapita= $\frac{\text{PDB tahun t}}{\text{Jumlah penduduk pada tahun t}}$	Seluruh Perangkat Daerah	Bapelitbang dan BPS Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	%	$\frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100$	Dinas Transnaker Kab. Rote Ndao	Dinas Transnaker Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya ketahanan pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot Masing-Masing Kelompok Pangan	Dinas Pangan Kab. Rote Ndao	Dinas Pangan Kab. Rote Ndao
3	**Meningkatnya Kontribusi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan**	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi dari Sektor Pertanian/Perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100$	Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao	Dinas Pertanian dan BPS Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	Produksi Sektor Pertanian	Ton	Jumlah produksi yang dihasilkan dari sektor pertanian	Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao	Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao
		Produksi Peternakan	Ekor	Jumlah Produksi Ternak Besar (Sapi, Kerbau dan Kuda)	Dinas Peternakan Kab. Rote Ndao	Dinas Peternakan Kab. Rote Ndao
		Produksi Kelautan dan Perikanan	Ton	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	DKP Kab. Rote Ndao	DKP Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya peran pariwisata dalam perekonomian daerah	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Disbudpar Kab. Rote Ndao	Disbudpar Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya peran koperasi UMKM, industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	(%)	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100$	Dinas Koperindag Kab. Rote Ndao	Dinas Koperindag dan BPS Kab. Rote Ndao

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4	**Meningkatnya konektivitas, ketersediaan sumber daya air dan permukiman yang layak**	Cakupan kualitas infrastruktur	%	Kumulatif dari Pembangunan Jalan (20%), Irigasi (20%), Permukiman (20%), Sanitasi (20%) dan Air Bersih (20%)	Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao Dinas PUPR Kab. Rote Ndao	Dinas PUPR Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya konektivitas	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100$		
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan Sumber Daya Air	Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi baik	%	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}} \times 100$	Dinas PUPR dan Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao	Dinas PUPR dan Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya kualitas permukiman dan kawasan permukiman	Cakupan Permukiman Layak	%	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Total rumah}} \times 100$	Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao	Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao
		Cakupan Akses Air minum	%	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$		
		Cakupan Sanitasi Layak	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah runah tinggal}} \times 100$		
5	**Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan**	Indeks kualitas air		Tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan		
	Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan	Meningkatnya Pengelolaan Sampah (%)	%	$\frac{\text{Jumlah sampah yang tertangani (ton)}}{\text{Total jumlah timbunan sampah di Kabupaten (ton)}} \times 100$		
	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap RTRW (%)	%	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$	Dinas PUPR Kab. Rote Ndao	Dinas PUPR Kab. Rote Ndao

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
6	**Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik**	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	Penilaian yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB	Bagian Orta Setda Kab. Rote Ndao	Bagian Orta Setda Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	BKA Kab. Rote Ndao	BKA Kab. Rote Ndao
		Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	$\frac{\text{PAD}}{\text{Jumlah pendapatan daerah}} \times 100$	Bapenda Kab. Rote Ndao	Bapenda Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya transparansi dan responsibilitas pelayanan publik	Keterpaduan Aplikasi Layanan Umum Unsur SPBE	%	Persentase Pelaksanaan SPBE (E-Budgeting, E-Planning, E-Monev, E-Procurement, E-Perijinan, E-Kepegawaian, E-Tourism, E-Pengaduan, E-Pendidikan dan E-Kesehatan)	Bapelitbang, BKA, Bag. Adm LPBJ, DPMPTSP, BKPP, Inspektorat, Dinas PKO, Dinkes, Dinas Kominfo Kab. Rote Ndao	Dinas Kominfo Kab. Rote Ndao

BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING - BULLU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : 84 TAHUN 2019
TANGGAL : 6 DESEMBER 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN ROTE NDAO

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					
	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan}}{\text{Jumlah Anak usia 4–6 Tahun}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Angka putus sekolah (APS) SD/MI	%	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja APS SD/MI se Kabupaten}}{\text{Jumlah seluruh APS SD/MI se Kabupaten}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	%	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja APS SMP/MTs se Kabupaten}}{\text{Jumlah seluruh APS SMP/MTs se Kabupaten}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SD/MI}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	$\frac{\text{Jumlah guru (SD/MI+SMP/MTs}}{\text{Jumlah murid (SD /MI+ SMP/MTs}} \times 10.000$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan dasar}} \times 1000$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Penduduk yang berusia > 15 tahun melek (tidak buta aksara)	%	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf se kabupaten}}{\text{Jumlah seluruh penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf se kabupaten}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	$\frac{\text{Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/DIV}}{\text{Jumlah SD/MI SMP/MTs}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya SDM kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan pembinaan atlet muda	%	$\frac{\text{Jumlah atlit pelajar yang di bina}}{\text{Jumlah seluruh atlit pelajar}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**DINAS KESEHATAN**					
	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup		$\frac{\text{Jumlah Ibu Hamil yang meninggal karena hamil,bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah Kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		$AKB = \frac{D_{0-\leq 1th}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000$ Dimana: $D_{0-\leq 1th}$ =Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. ∑Lahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Prevalensi balita stunting	%	$\frac{\text{Jumlah Balita Stunting}}{\text{Jumlah balita diukur}} \times 100$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Prevalensi balita gizi buruk	%	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita ditimbang}} \times 100$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS	%	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga berperilaku hidup bersih dan sehat di suatu wilayah pada periode waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga yang dipantau/ disurvei diwilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Jumlah Desa UCI (Universal Child Imunisation)	Desa	Jumlah Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Imunisation)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					
	Meningkatknya pelayanan jalan dalam kondisi mantap	Proporsi panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah panjang jalan kabupaten}} \times 100$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan rawa	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi yang terbangun}}{\text{Luas daerah irigasi}} \times 100$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatkan ketersediaan air baku dan konservasi SDA	Pembangunan dan pemeliharaan embung, bendung bangunan air lainnya	unit	Jumlah embung, bendung yang terbangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya konsistensi pemanfaatan ruang untuk pembangunan sesuai kaidah ruang yang dinamis, produktif dan ramah lingkungan melalui pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan ruang yang efektif	Ketaatan terhadap RTRW	%	$\frac{\text{Jumlah peraturan daerah dan dokumen lainnya yang tersusun}}{\text{Jumlah peraturan daerah dan dokumen lainnya yang akan disusun}} \times 100$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**					
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Cakupan permukiman layak	%	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Cakupan akses air minum	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga berakses air minum}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Cakupan sanitasi layak	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga berakses sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Terjaganya kualitas lingkungan sesuai standar baku mutu lingkungan	Indeks kualitas Air		$Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$ **Rumus metode IP:** $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$ $0 \leq PI_j \leq 1{,}0$ → **baik (memenuhi baku mutu)** $1{,}0 < PI_j \leq 5{,}0$ → **cemar ringan** $5{,}0 < PI_j \leq 10{,}0$ → **cemar sedang** $PI_j > 10{,}0$ → **cemar berat**	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kebersihan kota	Meningkatnya pengelolaan sampah	%	$\frac{\text{Volume timbulan sampah yang ditangani}}{\text{Total timbulan sampah}} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
5	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**					
	Menurunnya angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao	Tingkat penyelesaian masalah ketentraman, ketertiban umum yang tertangani selama 1 tahun	%	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Trantibum yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran Trantibum yang dilaporkan dan teridentifikasi salpolpp}} \times 100$	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
		Presentase penegakan Perda dan Perkada yang tertangani selama 1 Tahun	%	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan Perda dan Perkada}}{\text{Jumlah pelanggaran pelanggaran Perda dan Perkada}} \times 100$	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao	Cakupan pelayanan bencana kebakaran yang tertangani di Kabupaten Rote Ndao	%	$\frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran yang terjadi di Kab. Rote Ndao}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani}} \times 100$	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
6	**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					
	Terwujudnya pembinaan politik, kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini	Presentase partai politik yang diverifikasi	%	$\frac{\text{Jumlah parpol yang memperoleh kursi di DPRD}}{\text{Jumlah parpol yang terdaftar}} \times 100$	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Presentase ormas/LSM yang dibina	%	$\frac{\text{Jumlah ormas/LSM yang dibina}}{\text{Jumlah ormas/LSM yang terdaftar}} \times 100$	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Cakupan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan	%	$\frac{\text{Jumlah peserta sosialisasi, dialog dan lomba pidato 4 pilar kebangsaan}}{\text{Jumlah peserta yang terdaftar}} \times 100$	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Cakupan pembinaan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	%	$\frac{\text{Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan tes urine}}{\text{Jumlah peserta yang terdaftar}} \times 100$	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
7	**DINAS SOSIAL**					
	Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan PMKS dalam penanganan fakir miskin	Keluarga fakir miskin yang diberdayakan	%	$\frac{\text{Jumlah keluarga fakir miskin yang diberdayakan}}{\text{Keluarga fakir miskin yang ada}} \times 100$	Dinas Sosial	Dinas Sosial
		Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat bantuan pangan non tunai (BPNT)	%	$\frac{\text{Jumlah KPM BPNT}}{\text{Jumlah data terpadu kesejateraan sosial}} \times 100$	Dinas Sosial	Dinas Sosial

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Cakupan rumah tangga peserta JKN/Jamkesda	%	$\frac{\text{Rumah tangga peserta JKN/Jamkesda}}{\text{Total rumah tangga DTKS}} \times 100$	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Meningkatnya pelayanan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS	Korban bencana alam dan sosial yang mendapat bantuan tanggap darurat	%	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan}}{\text{Jumlah korban bencana}} \times 100$	Dinas Sosial	Dinas Sosial
		Keluarga penerima manfaat yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan	%	$\frac{\text{Jumlah KPM yang mendapat bantuan PKH}}{\text{Jumlah data terpadu kesejahteraan sosial}} \times 100$		
		Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lansia terlantar dan gepeng yang mendapat bantuan logistik dan jaminan hidup}}{\text{Jumlah PMKS penyandang disabilitas anak terlantar,lansia dan gepeng}} \times 100$	Dinas Sosial	Dinas Sosial
		Korban tindak kekerasan (KTK) yang mendapat bantuan bimbingan dan reahabilitasi	%	$\frac{\text{Jumlah KTK yang mendapat bantuan bimbingan dan rehabilitasi}}{\text{Jumlah KTK yang ada}} \times 100$	Dinas Sosial	Dinas Sosial
		Tersedianya data PMKS	%	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang didata PMKS}}{\text{Jumlah desa/kelurahan se–kabupaten rote ndao}} \times 100$	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan peran serta kelembagaan sosial dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial	Karang taruna yang mendapat bantuan pemberdayaan	%	$\frac{\text{Jumlah karang taruna yang mendapat bantuan pemberdayaan}}{\text{Jumlah karang taruna yang ada}} \times 100$	Dinas Sosial	Dinas Sosial
		Jumlah generasi muda yang memahami nilai-nilai kepahlawanan	%	$\frac{\text{Jumlah pelajar SLTA yang mendapat sosialisasi tentang keperintisan, kejuangan, dan kepahlawanan}}{\text{Jumlah pelajar SLTA yang seharusnya mendapat sosialisasi tentang keperintisan, kejuangan dan kepahlawanan}} \times 100$	Dinas Sosial	Dinas Sosial
		Desa/Kelurahan yang mendapat sosialisasi/penyuluhan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial	%	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang mendapat sosialisasi tentang program pembangunan, bidang kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah desa/kelurahan se Kab.Rote Ndao}} \times$	Dinas Sosial	Dinas Sosial

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
8	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**					
	Meningkatnya pengelolaan manajemen bencana	Pelayanan informasi rawan bencana	%	$\frac{\text{Jumlah pelayanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah data rawan bencana}} \times 100$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	$\frac{\text{Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah data rawan bencana}} \times 100$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	$\frac{\text{Jumlah pelayanan penyelamatan bencana}}{\text{Jumlah data korban bencana}} \times 100$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	**DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN**					
	Meningkatnya ketrampilan kompetensi tenaga kerja dan produktifitas tenaga kerja	Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	$\frac{\sum \text{Tenaga kerja yang dilatih}}{\sum \text{Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi}} \times 100$	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
		Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	$\frac{\sum \text{Tenaga kerja yang dilatih}}{\sum \text{Pendaftar pelatihan berbasis masyarakat}} \times 100$	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
		Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	$\frac{\sum \text{Tenaga kerja yang dilatih}}{\sum \text{Pendaftar pelatihan kewirausahan}} \times 100$	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada tahun n}} \times 100$	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
		Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	orang	Jumlah Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
		Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda pada tahun n}}{\text{Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda}} \times 100$	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
		Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang telah diperiksa	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
		Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun	kasus	Jumlah sengketa pengusaha pekerja per tahun	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	$\frac{\sum \text{Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)}}{\sum \text{Kasus yang dicatatkan}} \times 100$	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
	Meningkatnya taraf hidup transmigran	Persentase transmigran lokal	%	$\frac{\text{Jumlah transmigran lokal}}{\text{Jumlah transmigran}} \times 100$	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
10	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					
	Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	%	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga swasta}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak	Rasio KDRT	%	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	$\frac{\text{Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit layanan terpadu}}{\text{Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu}} \times 100$	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	$\frac{\text{Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah korban yang mendapatkan bantuan hukum}} \times 100$	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan KB, ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	$r = \{(\frac{P_t}{P_0}) \times (\frac{1}{t}) - 1\} \times 100$ r = laju pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah penduduk pada tahun t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan P0 Pt= Po + (B - D) + (Mi - Mo) Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) B (*birth*) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t D (*death*) = Jumlah Kematian selama periode 0 - t Mo = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t Mi = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Total fertility rate (TFR)	%	$TFR = 5\sum_{i=1}^{7} ASFR\ i$ $ASFR_i = \frac{bi}{Pif} \times K$ TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur b_i = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu p_i = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49 K = bilangan kontanta biasanya 1000	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Presentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB (%)	%	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang berperan } aktif\ di\ kampung\ KB}{\text{Jumlah semua perangkat daerah}} \times 100$	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Ratio akseptor KB	%	$\frac{\text{Jumlah akseptor KB}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100$	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49	%	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100$	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	$\frac{\text{Jumlah petugas pembantu pembina KB Desa}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100$	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
11	**DINAS PANGAN**					
	Meningkatnya ketersediaan pangan utama	Ketersediaan pangan utama	%	$\frac{\text{Total produksi}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	Dinas Pangan	Dinas Pangan
		Pola Pangan Harapan (PPH)	%	$\frac{\text{Skor PPH}}{\text{Skor PPH yang ditargetkan}} \times 100$	Dinas Pangan	Dinas Pangan
		Pencapaian Skor PPH	Poin	Pencapaian skor PPH Nasional	Dinas Pangan	Dinas Pangan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	$\frac{\text{Jumlah pangan segar yang aman dikonsumsi}}{\text{Jumlah pangan segar yang aman diuji}} \times 100$	Dinas Pangan	Dinas Pangan
12	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					
	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah}} \times 100$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Rasio bayi berakte kelahiran	%	$\frac{\text{Jumlah bayi berakte kelahiran}}{\text{Jumlah bayi}} \times 100$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Rasio pasangan berakte nikah	%	$\frac{\text{Jumlah pasangan berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}} \times 100$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Penerapan KTP nasional berbasis NIK		sudah/belum	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
13	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					
	Meningkatnya transparansi responsibilitas pelayanan publik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	%	$\frac{\text{Jumlah kantor pemerintahn desa yang baik}}{\text{Jumlah seluruh pemerintah desa}} \times 100$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan LPM}}{\text{Jumlah LPM}}$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase LPM aktif	%	$\frac{\text{Jumlah LPM aktif}}{\text{Jumlah seluruh pemerintah desa}} \times 100$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase LPM Berprestasi	%	$\frac{\text{Jumlah LPM berprestasi}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase PKK aktif	%	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Persentase Posyandu aktif	%	$\frac{\text{Jumlah Posyandu aktif}}{\text{Total posyandu}} \times 100$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	$\frac{\text{Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat}}{\text{Total pasca program pemberdayaan masyarakat}} \times 100$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Cakupan desa siaga aktif	%	$\frac{\text{Jumlah Desa Siaga Aktif}}{\text{Jumlah Desa Siaga Yang dibentuk}} \times 100$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	**DINAS PERHUBUNGAN**					
	Meningkatkan konektivitas	Meningkatnya prasarana/fasilitas perhubungan darat	%	$\frac{\text{Jumlah pemasangan rambu–rambu pada tahun n}}{\text{Jumlah rambu–rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100$	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
15	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**					
	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik	Persentase Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	$\frac{\text{Persentase unsur aplikasi yang sudah dilaksanakan}}{\text{8 unsur aplikasi layanan unsur SPBE}} \times 100$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistk dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistk dan Persandian
16	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**					
	Meningkatnya peran koperasi UMKM, industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian	Persentase koperasi aktif	%	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase Usaha Mikro Kecil Menengah	%	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100$	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	$\frac{\text{Jumlah kelompok pedagang atau usaha informal,yang mendapat bantuan binaan pemda tahun n}}{\text{Jumlah kelompok pedagang atau usaha informasi}} \times 100$	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Cakupan bina kelompok pengrajin	%	$\frac{\text{Jumlah kelompok pengrajin yang mendapat bantuan binaan pemda tahun n}}{\text{Jumlah kelompok pengrajin}} \times 100$	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
17	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**					
	Meningkatnya investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN/PMA	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (x1.000.000)	Rp.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Rasio daya serap tenaga kerja		$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan}}{\text{PMA/PMDN Jumlah seluruh PMA/PMDN}}$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (miliyar rupiah)	%	$\frac{\text{Realisasi PMDN Tahun evaluasi} - \text{Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi}}{\text{Realisasi PMDN sebelum evaluasi}} \times 100\%$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya transparansi dan responsibilitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	%	Jumlah nilai indeks di kali nilai dasar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**					
	Meningkatnya peran pariwisata dalam perekonomian daerah	Jumlah Kunjungan Wisata	orang	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Destinasi wisata yang dikembangkan	Unit	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Cakupan Desa Wisata	Desa	Jumlah desa wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
19	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**					
	Meningkatnya produksi dan produktivitas	Produksi perikanan Tangkap	Ton	$\frac{\text{Jumlah produksi ikan (Ton)}}{\text{Target daerah (Ton)}} \times 100$	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	Produksi budidaya rumput laut	Ton	$\frac{\text{Jumlah produksi rumput laut (Ton)}}{\text{Target daerah (Ton)}} \times 100$	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Konsumsi ikan	kg/kapita	$\frac{\text{Jumlah konsumsi ikan (Kg)}}{\text{Target daerah (Kg)}} \times 100$	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Cakupan bina kelompok nelayan	%	$\frac{\text{Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun n}}{\text{Jumlah kelompok nelayan}} \times 100$	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
20	**DINAS PERTANIAN**					
	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor sektor pertanian dan perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100$		
		Produksi sektor pertanian	Ton	Jumlah produksi yang dihasilkan dari sektor pertanian		
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) dibagi luas areal tanaman padi /bahan pangan utama lokal lainnya (ha) x 100	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
		Cakupan bina kelompok petani	%	$\frac{\text{jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda tahun n}}{\text{Jumlah kelompok tani}} \times 100$	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
		Produksi lontar	Ton	Jumlah produksi lontar (ton)	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
21	**DINAS PETERNAKAN**					
	Meningkatnya produksi dan produktifitas ternak	Produksi peternakan	Ekor	Jumlah produksi peternakan	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan
22	**BAGIAN UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL**					
	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi dengan baik sesuai dengan standar keprotokolan	%	Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi dengan baik sesuai dengan standar keprotokolan dibagi jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah x 100	Bagian Umum, Humas dan Protokol	Bagian Umum, Humas dan Protokol
		Cakupan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan umum sesuai kebutuhan	%	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan dibagi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan x 100	Bagian Umum, Humas dan Protokol	Bagian Umum, Humas dan Protokol
23	**BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	%	Hasil penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Cakupan kegiatan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kualitas kehidupan umat beragama	%	$\frac{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan/ peningkatan kualitas kehidupan umat beragama yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan yang direncanakan}} \times 100$	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Persentase penerima beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu	%	$\frac{\text{Jumlah penerima beasiswa}}{\text{Jumlah yang direncanakan}} \times 100$	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
24	**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**					
	Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan perundang-undangan daerah	Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat	%	$\frac{\text{Jumlah Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat}}{\text{Jumlah seluruh Perangkat yang tercantum dalam program legislasi daerah}} \times 100$	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
		Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah	%	$\frac{\text{Jumlah Peraturan perundang Daerah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah}}{\text{Jumlah seluruh Peraturan Perundang–undangan daerah}} \times 100$	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
25	**BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	Penilaian yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja	%	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja}}{\text{Jumlah seluruh Perangkat Daerah}} \times 100$	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	%	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan LAKIP tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh Perangkat Daerah}} \times 100$	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOP	%	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SOP}}{\text{Jumlah seluruh Perangkat Daerah}} \times 100$	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun analisis beban kerja dan Anjab	%	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun analisis beban kerja dan Anjab}}{\text{Jumlah seluruh Perangkat Daerah}} \times 100$	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		Tersedianya peraturan tentang kelembagaan	dokumen	Jumlah Peraturan tentang kelembagaan perangkat daerah	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Bagian Organisasi dan Tata Laksana

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Persentase ketersediaan OPD sesuai kebutuhan daerah	%	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang ada}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang dibutuhkan}} \times 100$	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
26	**BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM**					
	Meningkatnya pelayanan administrasi bidang ekonomi, pembangunan dan sumber daya alam	Presentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan fisik keuangan tepat waktu	%	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan realisasi fisik keuangan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh Perangkat Daerah}} \times 100$	Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		Presentase BUMD yang sehat	%	$\frac{\text{Jumlah BUMD yang sehat}}{\text{Jumlah total BUMD}} \times 100$	Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		Ketersediaan data potensi sumber daya alam	%	$\frac{\text{Jumlah PD yang menyampaikan data potensi sumber daya alam}}{\text{Jumlah perangkat daerah penyedia data}} \times 100$	Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
27	**BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**					
	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan daerah	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yang dilayani}} \times 10$	Bagian Perpustakaan dan Kearsipan	Bagian Perpustakaan dan Kearsipan
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buku	Jumlah koleksi buku perpustakaan	Bagian Perpustakaan dan Kearsipan	Bagian Perpustakaan dan Kearsipan
		Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	Bagian Perpustakaan dan Kearsipan	Bagian Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	Jumlah pengunjung perpustakaan/tahun	Bagian Perpustakaan dan Kearsipan	Bagian Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul buku	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Bagian Perpustakaan dan Kearsipan	Bagian Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	$\frac{\text{Jumlah pustakawan,tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai}} \times 100$	Bagian Perpustakaan dan Kearsipan	Bagian Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	Presentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	$\frac{\text{Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku}}{\text{Jumlah seluruh Perangkat Daerah}} \times 100$	Bagian Perpustakaan dan Kearsipan	Bagian Perpustakaan dan Kearsipan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
28	**BAGIAN ADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**					
	Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa	Persentase fasilitasi pangadaan barang/jasa	%	$\frac{\text{Total belanja e-procurement}}{\text{Total belanja pengadaan dalam APBD}} \times 100$	Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
29	**SEKRETARIAT DEWAN**					
	Meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan wewenang	Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan	Perda	Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan	Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao	Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao
		Jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan	Keputusan DPRD	Jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan	Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao	Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao
		Jumlah rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan	Ranperda	Jumlah rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan	Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao	Sekretariat DPRD Kab. Rote Ndao
30	**SEKRETARIAT KORPRI**					
	Membangun solidaritas dan soliditas pegawai	Persentase ASN yang mengikuti lomba dalam rangka HUT KORPRI	%	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang mengikuti lomba}}{\text{Jumlah seluruh aparatur}} \times 100$	Sekretariat KORPRI	Sekretariat KORPRI
	Pengayoman dan perlindungan hukum untuk terciptanya rasa aman bagi anggota KORPRI	Persentase ASN yang mengikuti Pekan Olah Raga Seni dan Budaya (PORSENI) KORPRI	%	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang mengikuti PORSENI}}{\text{Jumlah seluruh aparatur}} \times 100$	Sekretariat KORPRI	Sekretariat KORPRI
	Mewujudkan organisasi yang kuat berwibawa bagi anggota KORPRI	Penyelenggaraan Rapat Kerja Musyawarah Kabupaten	%	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang mengikuti Rapat Kerja Musyawarah Kabupaten}}{\text{Jumlah seluruh aparatur}} \times 100$	Sekretariat KORPRI	Sekretariat KORPRI
31	**KECAMATAN LOBALAIN**					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Presentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah Penanganan pengaduan masyarakat yang tuntas diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100	Kecamatan Lobalain	Kecamatan Lobalain
		Presentase keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan	%	Jumlah Partisipasi masyarakat yang hadir dalam musrenbang kecamatan dibagi jumlah masyarakat yang diundang x 100	Kecamatan Lobalain	Kecamatan Lobalain
		Presentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	%	Jumlah PKK Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan dibagi jumlah desa/kelurahan x 100	Kecamatan Lobalain	Kecamatan Lobalain

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
32	**KECAMATAN ROTE BARAT DAYA**					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Presentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah Penanganan pengaduan masyarakat yang tuntas diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100	Kecamatan Rote Barat Daya	Kecamatan Rote Barat Daya
		Presentase keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan	%	Jumlah Partisipasi masyarakat yang hadir dalam musrenbang kecamatan dibagi jumlah masyarakat yang diundang x 100	Kecamatan Rote Barat Daya	Kecamatan Rote Barat Daya
		Presentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	%	Jumlah PKK Desa yang mendapatkan pembinaan dibagi jumlah desa x 100	Kecamatan Rote Barat Daya	Kecamatan Rote Barat Daya
33	**KECAMATAN ROTE BARAT LAUT**					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Presentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah Penanganan pengaduan masyarakat yang tuntas diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100	Kecamatan Rote Barat Laut	Kecamatan Rote Barat Laut
		Presentase keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan	%	Jumlah Partisipasi masyarakat yang hadir dalam musrenbang kecamatan dibagi jumlah masyarakat yang diundang x 100	Kecamatan Rote Barat Laut	Kecamatan Rote Barat Laut
		Presentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	%	Jumlah PKK Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan dibagi jumlah desa/kelurahan x 100	Kecamatan Rote Barat Laut	Kecamatan Rote Barat Laut
34	**KECAMATAN ROTE BARAT**					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Presentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah Penanganan pengaduan masyarakat yang tuntas diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100	Kecamatan Rote Barat	Kecamatan Rote Barat
		Presentase keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan	%	Jumlah Partisipasi masyarakat yang hadir dalam musrenbang kecamatan dibagi jumlah masyarakat yang diundang x 100	Kecamatan Rote Barat	Kecamatan Rote Barat
		Presentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	%	Jumlah PKK Desa yang mendapatkan pembinaan dibagi jumlah desa x 100	Kecamatan Rote Barat	Kecamatan Rote Barat
35	**KECAMATAN ROTE SELATAN**					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Presentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah Penanganan pengaduan masyarakat yang tuntas diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100	Kecamatan Rote Selatan	Kecamatan Rote Selatan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Presentase keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan	%	Jumlah Partisipasi masyarakat yang hadir dalam musrenbang kecamatan dibagi jumlah masyarakat yang diundang x 100	Kecamatan Rote Selatan	Kecamatan Rote Selatan
		Presentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	%	Jumlah PKK Desa yang mendapatkan pembinaan dibagi jumlah desa x 100	Kecamatan Rote Selatan	Kecamatan Rote Selatan
36	**KECAMATAN ROTE TENGAH**					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Presentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah Penanganan pengaduan masyarakat yang tuntas diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100	Kecamatan Rote Tengah	Kecamatan Rote Tengah
		Presentase keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan	%	Jumlah Partisipasi masyarakat yang hadir dalam musrenbang kecamatan dibagi jumlah masyarakat yang diundang x 100	Kecamatan Rote Tengah	Kecamatan Rote Tengah
		Presentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	%	Jumlah PKK Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan dibagi jumlah desa/kelurahan x 100	Kecamatan Rote Tengah	Kecamatan Rote Tengah
37	**KECAMATAN ROTE TIMUR**					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Presentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah Penanganan pengaduan masyarakat yang tuntas diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100	Kecamatan Rote Timur	Kecamatan Rote Timur
		Presentase keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan	%	Jumlah Partisipasi masyarakat yang hadir dalam musrenbang kecamatan dibagi jumlah masyarakat yang diundang x 100	Kecamatan Rote Timur	Kecamatan Rote Timur
		Presentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	%	Jumlah PKK Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan dibagi jumlah desa/kelurahan x 100	Kecamatan Rote Timur	Kecamatan Rote Timur
38	**KECAMATAN PANTAI BARU**					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Presentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah Penanganan pengaduan masyarakat yang tuntas diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100	Kecamatan Pantai Baru	Kecamatan Pantai Baru
		Presentase keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan	%	Jumlah Partisipasi masyarakat yang hadir dalam musrenbang kecamatan dibagi jumlah masyarakat yang diundang x 100	Kecamatan Pantai Baru	Kecamatan Pantai Baru
		Presentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	%	Jumlah PKK Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan dibagi jumlah desa/kelurahan x 100	Kecamatan Pantai Baru	Kecamatan Pantai Baru

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
39	**KECAMATAN LANDU LEKO**					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Presentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah Penanganan pengaduan masyarakat yang tuntas diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100	Kecamatan Landu Leko	Kecamatan Landu Leko
		Presentase keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan	%	Jumlah Partisipasi masyarakat yang hadir dalam musrenbang kecamatan dibagi jumlah masyarakat yang diundang x 100	Kecamatan Landu Leko	Kecamatan Landu Leko
		Presentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	%	Jumlah PKK Desa yang mendapatkan pembinaan dibagi jumlah desa x 100	Kecamatan Landu Leko	Kecamatan Landu Leko
40	**KECAMATAN NDAO NUSE**					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Presentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah Penanganan pengaduan masyarakat yang tuntas diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100	Kecamatan Ndao Nuse	Kecamatan Ndao Nuse
		Presentase keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang	%	Jumlah Partisipasi masyarakat yang hadir dalam musrenbang kecamatan dibagi jumlah masyarakat yang diundang x 100	Kecamatan Ndao Nuse	Kecamatan Ndao Nuse
		Presentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	%	Jumlah PKK Desa yang mendapatkan pembinaan dibagi jumlah desa x 100	Kecamatan Ndao Nuse	Kecamatan Ndao Nuse
41	**INSPEKTORAT DAERAH**					
	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total temuan}} \times 100$	Inspektorat	Inspektorat
		Jumlah Temuan BPK	Temuan	Jumlah temuan BPK	Inspektorat	Inspektorat
		Persentase Pelanggaran Disilin Pegawai	%	$\frac{\text{PNS yang diperiksa karena pelanggaran disiplin}}{\text{Total PNS}} \times 100$	Inspektorat	Inspektorat

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
42	**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	%	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan yang disusun serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati}}{\text{Target Dokumen Perencanaan yang disusun}} \times 100$	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	%	$\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan}} \times 100$	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	%	$\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan}} \times 100$	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah	Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan	Jenis	Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
43	**BADAN KEUANGAN DAN ASET**					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	Opini	Tidak memberikan pendapat (Disclaimer), Wajar dengan Pengecualian (WDP) atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase SILPA terhadap APBD	%	$\frac{\text{Total Silpa}}{\text{Total APBD}} \times 100$	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Penetapan APBD		Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
44	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Presentase PAD terhadap pendapatan	%	$\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100$	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
45	**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					
	Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan	Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal}}{\text{Jumlah total ASN}} \times 100$	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Presentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	$\frac{\text{Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktual}}{\text{Jumlah total pejabat}} \times 100$	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Persentase kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	%	$\frac{\text{Jumlah kasus – kasus pelanggaran disiplin ASN}}{\text{Jumlah total ASN}} \times 100$	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING - BULLU